

Model Strategi Tindak Tutur Tokoh Politik dalam Wacana Pembangunan Pendidikan: Sebuah Pendekatan Pragmatik Interpersonal

Dina Mardiana¹, Fathur Rokhman², Rustono³, Hari Bakti Mardikantoro⁴
{dina80hasbullah@students.unnes.ac.id¹, fathurrokhman@mail.unnes.ac.id², rustono58@yahoo.co.id³,
haribaktim@gmail.com⁴}

Fakultas Bahasa dan Seni-Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia¹²³⁴

Abstrak. Pentingnya merumuskan sebuah konsepsi ilmiah model strategi tindak tutur tokoh politik dalam wacana pembangunan pendidikan sebagai acuan para tokoh politik dalam bertindak tutur sesuai kapasitasnya pada konteks pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan model strategi tindak tutur tokoh politik dalam wacana pembangunan pendidikan. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan ancangan pragmatolinguistik dan metode *R&D* dengan model pengembangan ADDIE. Guna menganalisis dan mengevaluasi tuturan tokoh politik dalam wacana pembangunan pendidikan diterapkan pendekatan pragmatik interpersonal. Data dikumpulkan melalui kegiatan observasi pada dokumentasi rekaman rapat kerja Komisi X DPR-RI dan rekaman tayangan berita televisi pada kanal *youtube*. Hasil penelitian menemukan 66 data tuturan tokoh politik dalam wacana pembangunan pendidikan yang dianalisis secara pragmatik interpersonal untuk selanjutnya dikembangkan sebagai model strategi tindak tutur tokoh politik dalam wacana pembangunan pendidikan. Model strategi tindak tutur tersebut mencakupi penggunaan prinsip kerja sama berbahasa, prinsip kesantunan berbahasa, strategi kesantunan berbahasa, dan strategi retorik interpersonal.

Kata kunci: Model Strategi; Tindak Tutur; Tokoh Politik; Wacana Pembangunan Pendidikan; Pragmatik Interpersonal

A Strategic Model of Political Figures' Speech in the Discourse of Educational Development: An Interpersonal Pragmatic Approach

Abstract. The importance of developing a scientific conception of the speech act strategy model of political figures in the educational development discourse as a reference for political figures in acting according to their capacity in the educational context. The aim of this research is to find a strategy model for political figures' speech acts in educational development discourse. This research was carried out using a pragmatolinguistic design and *R&D* method with the ADDIE development model. In order to analyze and convey the utterance of political figures in the educational development discourse, an interpersonal pragmatic approach is applied. Data was collected through observation activities on recorded documentation of DPR-RI Commission X work meetings and recordings of television news broadcasts on the YouTube channel. The results of the research found 66 utterance data of political figures in educational development discourse which were analyzed using interpersonal pragmatics and then developed as a strategy model for political figures' speech acts in educational development discourse. The speech act strategy model includes the use of cooperative principles, politeness principles, language politeness strategies, and interpersonal rhetorical strategies.

Keywords: Strategy Model; Speech Acts; Political Figures; Educational Development Discourse; Interpersonal Pragmatics

1 Pendahuluan

Pragmatik interpersonal dicetuskan oleh Leech, yang berperspektif pada aspek komunikasi dan interaksi interpersonal, berakar pada teori kesantunan Brown & Levinson di tahun 1978 dan 1987 [1, 2, 3, 4, 5]. Pragmatik interpersonal dapat dipahami sebagai inheren interdisipliner atau multidisiplin, sebagai seperangkat prinsip percakapan yang harus dipatuhi dalam kegiatan berkomunikasi agar kooperatif dan santun [1, 6, 7, 8, 9]. Tokoh politik atau politisi merupakan figur politik yang ahli politik dan kenegaraan dan ikut serta dalam pemerintahan [10]. Di Indonesia, para politisi dapat dijumpai, salah satunya, saat ia bertugas sebagai anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Seorang politisi adalah penyambung suara rakyat, mewakili suara rakyat untuk memberikan perhatian terutama pada masalah yang berkenaan dengan kekuasaan, pemerintahan dan wewenang, serta bertugas melaksanakan kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat [11]. Fokus kerja politisi yang bertugas pada bidang pendidikan di Komisi X DPR-RI adalah pada konteks pembangunan pendidikan. Namun, ujaran yang dituturkan pada konteks tersebut hendaknya mematuhi prinsip percakapan sebagaimana dalam konsep pragmatik interpersonal.

Penggunaan tindak tutur para politisi menjadi pusat perhatian masyarakat luas, dan ini merupakan pendidikan literasi humanis bagi masyarakat Indonesia yang multikultural [12]. Setiap masyarakat mempunyai aturan tersendiri dalam berkomunikasi dan berinteraksi yang menyangkut tata krama agar komunikasi tetap santun [13]. Namun, bahasa sudah menjadi alat komunikasi di dunia [14], dan selazimnya seorang politisi bertutur sesuai kaidah percakapan tanpa melihat latarbelakang sosial seorang politisi yang sudah menjadi milik masyarakat yang multikultural tersebut. Disadari, tidak semua politisi di parlemen mempunyai kemampuan retorik yang baik, tetapi hal itu merupakan salah satu aspek penting dalam bertindak tutur di parlemen, meskipun latar belakang aspek sosial budaya pun mempengaruhi gaya berkomunikasi tersebut [15], [16]. Tindak tutur yang santun dari seorang politisi dapat mengondusifkan situasi politik tentang isu-isu pembangunan pendidikan yang tak jarang membuat resah masyarakat.

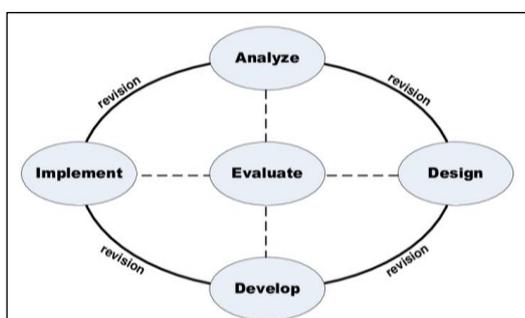
Studi tentang tindak tutur dalam wacana politik cukup banyak dilakukan oleh para peneliti dalam beberapa tahun terakhir, seperti Ilie [17]; Fairclough [18]; Rashidi and Souzandehfar [19]; Hansson [20]; KhosraviNik and Unger [21]; Hashim and Safwat [22]; Flores-Ferrán [23]; Maskuri et al. [24]; Salayo [25]; Haselow [26]; How [27]; and Kartika et al. [28]. Area penelitian tersebut menggunakan teori linguistik, pragmatik, komunikasi politik, dan analisis wacana kritis yang berfokus pada bagaimana tokoh politik menggunakan bahasa untuk mempengaruhi, membujuk, dan membentuk opini publik mengenai berbagai isu-isu hangat yang terjadi dalam kebijakan di pemerintahan. Studi-studi tersebut menawarkan pandangan komprehensif tentang bagaimana tokoh politik secara strategis menggunakan tindak tutur untuk mempengaruhi publik melalui wacana politiknya. Hasil penelitian Maskuri et al; Haselow; Prayitno et al.; Nursyamsi et al.; Majid [24, 26, 29, 30, 31], hanya menganalisis tindak tutur tokoh politik tanpa menghasilkan sebuah model strategi tindak tutur sebagai referensi bagi tokoh politik untuk bertutur secara pragmatik interpersonal. Referensi yang ada pun belum menyajikan model strategi tindak tutur secara kongret untuk tokoh politik [11, 32]. Strategi tindak tutur tokoh politik berbeda dengan komunikasi politik yang hanya berisi pesan politik dalam konteks persaingan politik untuk memengaruhi, memperoleh, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan pada saat kampanye. Strategi tindak tutur merupakan kemampuan bertutur yang mematuhi prinsip percakapan dalam kegiatan komunikasi saat menjabat sebagai politisi di legislatif untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Tuturan tersebut merupakan ungkapan sikap personal seorang politisi dan memiliki pengaruh terhadap sikap dan perilaku pendengarnya, terutama para masyarakat yang diwakilinya di parlemen. Pendekatan yang digunakan adalah pragmatik interpersonal yang secara kritis dipadukan dengan analisis linguistik kritis untuk merumuskan model strategi tindak tutur tokoh politik dalam wacana pembangunan pendidikan. Hal tersebut belum pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan model strategi tindak tutur tokoh politik dalam wacana pembangunan pendidikan. Temuan hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai model strategi tindak tutur tokoh politik dalam wacana pembangunan pendidikan. Dalam

hal ini, para tokoh politik dapat mencapai makna interpersonal yang sangat baik dalam bertindak tutur sesuai kapasitasnya pada konteks pembangunan pendidikan.

2 Metode

Secara teoretis penelitian ini menggunakan ancangan pragmalinguistik dengan pendekatan pragmatik interpersonal [1]. Secara praktis penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian pengembangan (*Research and Development/ R&D*). Hal tersebut karena penelitian ini menghasilkan sebuah produk buku tentang model strategi tindak tutur tokoh politik dalam wacana pembangunan pendidikan yang diperoleh dari observasi data tuturan rekaman video dan diterapkan dalam konteks wacana politik bidang pendidikan. Prosedur penelitian mengacu pada langkah-langkah penelitian dan pengembangan model *analysis, design, development, implementation, and evaluation* (ADDIE) dari Branch [33] seperti ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1 Pendekatan ADDIE untuk mengembangkan produk [33]

Berdasarkan metode *R&D* dengan model ADDIE dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) *Analysis*, tahap ini tim peneliti menganalisis tuturan tokoh politik pada wacana pembangunan pendidikan yang datanya diperoleh dari rekaman video di kanal *youtube* dan merumuskan analisis kebutuhan terhadap model strategi tindak tutur tokoh politik dalam wacana pembangunan pendidikan; (2) *Design*, tim peneliti merancang model strategi tindak tutur tokoh politik dalam wacana pembangunan pendidikan berdasarkan hasil analisis tuturan tokoh politik pada wacana pembangunan pendidikan melalui rekaman video yang diunggah dari kanal *youtube* serta hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan; (3) *Development*, tim peneliti mengembangkan model strategi tindak tutur tokoh politik dalam wacana pembangunan pendidikan sebagai konten materi dalam buku referensi yang akan diterbitkan, yang sebelumnya dievaluasi dan divalidasi oleh tim ahli; (4) *Implementation*, tim peneliti akan menyajikan isi buku referensi tentang model strategi tindak tutur tokoh politik dalam wacana pembangunan pendidikan serta menyampaikannya kepada pengguna melalui kegiatan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion/ FGD*) sekaligus sebagai tahapan triangulasi hasil penelitian; dan (5) *Evaluation*, tahap mengevaluasi hasil respons pengguna dan validasi ahli terhadap model strategi tindak tutur tokoh politik yang didokumentasikan dalam sebuah buku referensi dan selanjutnya akan dilakukan publikasi secara luas terhadap produk buku referensi tersebut.

3 Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

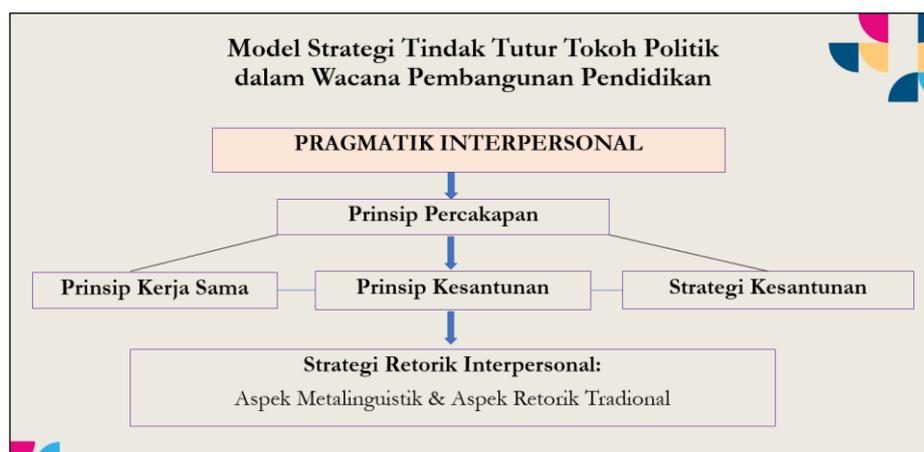
Berdasarkan tujuannya, penelitian ini difokuskan pada analisis tindak tutur tokoh politik dalam wacana pembangunan pendidikan dalam kerangka pragmatik interpersonal. Hasil analisis tersebut dikembangkan menjadi model strategi tindak tutur tokoh politik dalam wacana pembangunan pendidikan. Pada tahap awal, data dianalisis secara pragmalinguistik yang berfokus pada

pematuhan dan pelanggaran terhadap prinsip percakapan yang mencakupi prinsip kerja sama, prinsip kesantunan, dan strategi kesantunan. Hal ini juga mempertimbangkan penggunaan strategi retorik interpersonal yang mencakupi aspek metalinguistik dan aspek retorik tradisional, yaitu penggunaan prinsip ironi dan kelakar, serta hiperbola dan litotes dalam tuturan. Selanjutnya, untuk menemukan hasil evaluasi daya pragmatik tuturan tokoh politik, data tersebut dianalisis secara parsial menggunakan analisis pragmatik kritis yang memadukan analisis pragmalinguistik dan analisis wacana kritis. Hasil analisis terhadap tuturan tokoh politik dikembangkan sebagai model strategi tindak tutur tokoh politik dalam wacana pembangunan pendidikan.

Sebanyak 66 data tuturan percakapan, tanggapan, maupun pernyataan dalam penggalan wacana yang diperoleh dan diobservasi dari 8 isu utama dan 12 konteks wacana tentang pembangunan pendidikan yang terekam dalam tayangan rapat kerja Komisi X DPR-RI, wawancara dan diskusi dalam tayangan berita televisi terhadap para tokoh politik yang bertugas di Komisi X DPR-RI. Observasi dilakukan selama 12 bulan di pertengahan tahun 2023 hingga pertengahan tahun 2024. Data tuturan tokoh politik tersebut terekam sejak tahun 2019 hingga 2024 di kanal *youtube* Komisi X DPR-RI, Kompas TV, CNN Indonesia, iNews TV, dan Metro TV. Data tuturan tersebut mencakupi berbagai isu wacana pembangunan pendidikan yang sedang hangat diperbincangkan dan dipertentangkan serta menjadi gejala di masyarakat Indonesia pada saat itu. Isu-isu tersebut adalah “Orientasi Pendidikan Karakter untuk Membentuk SDM Unggul”; “Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kampus Merdeka”; “Kamus Sejarah Indonesia”; “Tim Bayangan Kemendikbud Ristek”; “Tenaga Honorer dan Guru PPPK”; “Kenaikan UKT”; “Program Makan Siang Gratis” dan “Skandal Guru Besar”.

Hasil analisis pragmalinguistik terhadap kekooperatifan dan kesantunan tuturan tokoh politik menunjukkan kepatuhan yang mendominasi tindak tutur para politisi di Komisi X DPR-RI. Secara umum, tindak tutur tokoh politik dalam wacana pembangunan pendidikan menunjukkan kekooperatifan terhadap berbagai isu pembangunan pendidikan. Pematuhan kesantunan berbahasa tersebut dengan kecenderungan menggunakan strategi kesantunan berbahasa dari Brown dan Levinson [3, 34], serta strategi retorik interpersonal dari Leech [1, 35]. Bidal-bidal prinsip kesantunan Leech cenderung diabaikan karena respon ketidaksetujuan para politisi terhadap beberapa kebijakan kontroversial yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Temuan hasil penelitian ini adalah model strategi tindak tutur tokoh politik dalam wacana pembangunan pendidikan. Model strategi tindak tutur tersebut berupa penggunaan pragmatik interpersonal sebagai seperangkat prinsip percakapan yang harus dipatuhi dalam kegiatan berkomunikasi agar kooperatif dan santun. Cakupan model strategi tindak tutur tersebut dijelaskan pada gambar berikut ini.



Gambar 2 Model Strategi Tindak Tutur Tokoh Politik dalam Wacana Pembangunan Pendidikan

Pada Gambar 2., tersebut dapat dijelaskan cakupan model strategi tindak tutur tokoh politik dalam wacana pembangunan pendidikan adalah kemampuan menggunakan konsep pragmatik interpersonal sebagai seperangkat prinsip percakapan yang harus dipatuhi dalam kegiatan berkomunikasi agar kooperatif dan santun. Prinsip percakapan merupakan mekanisme percakapan antar pesertanya agar dapat bercakap-cakap secara kooperatif dan santun yang mencakupi prinsip kooperatif dan prinsip kesantunan [1, 36]. Menurut Halliday dalam Leech [1] prinsip kerja sama dan prinsip kesantunan merupakan bagian dari retorik interpersonal yang dalam istilah Leech [1] disebut pragmatik interpersonal. Ruang lingkup pragmatik interpersonal juga mencakupi penggunaan strategi retorik interpersonal, yaitu aspek metalinguistik dan aspek retorik tradisional. Selain itu, temuan penelitian ini juga mengacu pada pendapat Rustono [36], bahwa bercakap-cakap tak sekedar kemampuan mematuhi prinsip kerja sama dan prinsip kesantunan, tetapi kemampuan menggunakan strategi kesantunan [3] yang mencakupi nosi muka positif dan negatif.

3.1 Pembahasan

Penggunaan prinsip kerja sama sebagai bagian dari model strategi tindak tutur merupakan upaya untuk membimbing para tokoh politik sebagai peserta percakapan agar dapat melakukan percakapan secara kooperatif. Bahwa di dalam setiap tuturan selalu ada tambahan makna yang merupakan tambahan keterangan yang tidak diucapkan oleh penuturnya itu tertangkap juga oleh pendengar sebagai mitra tuturnya. Makna tambahan itu timbul akibat dari adanya penerapan kaidah dari prinsip percakapan. Prinsip percakapan itu, yang oleh Grice [37] dinamakan prinsip *cooperative principle* atau prinsip kerja sama. Prinsip kerja sama ini di antaranya mengatur apa yang mestinya dilakukan oleh tokoh politik saat bertutur agar terdengar koheren. Penutur yang tidak memberikan kontribusi terhadap koherensi percakapan sama dengan tidak mematuhi prinsip kerja sama [37]. Selanjutnya, Grice menjabarkan empat bidal prinsip kerja sama tersebut yang mencakupi (1) bidal kuantitas (*maxim of quantity*), (2) bidal kualitas (*maxim of quality*); (3) bidal relevansi (*maxim of relevance*); dan (4) bidal cara (*maxim of manner*).

Prinsip kesantunan (*politeness principle*) itu berkenaan dengan aturan tentang hal-hal yang bersifat sosial, estetis, dan moral di dalam bertindak tutur, karena itu di dalam tuturan penutur tidak cukup hanya mematuhi prinsip kerja sama saja [1, 36]. Penting tidaknya perilaku kesantunan yang ditunjukkan pada pihak ketiga sangat beragam karena ditentukan oleh berbagai faktor dan ragam-ragam lintas budaya yang tentunya berkaitan dengan norma sosial dan moral. Oleh karena itu, Leech menegaskan bahwa prinsip kesantunan tersebut berada satu maksim retorik interpersonal dengan prinsip kerja sama. Prinsip kesantunan yang dikemukakan oleh Leech di tahun 1983 [1] dijabarkan dalam enam maksim atau bidal, yang meliputi (1) bidal ketimbangrasaan, (2) bidal kemurahhatian, (3) bidal keperkenanan, (4) bidal kerendahhatian, (5) bidal kesetujuan, dan (6) bidal kesimpatian. Prinsip kesantunan dan prinsip kerja sama sangat penting digunakan secara bersamaan, karena dapat saling melengkapi secara jelas dan lengkap dalam sebuah prinsip percakapan. Seorang tokoh politik sangat penting bertutur dengan mematuhi prinsip kesantunan, bahwa kegiatan komunikasi politik dalam konteks pendidikan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi secara jelas dan kooperatif saja, tetapi juga membutuhkan kenyamanan sebuah hubungan sosial antara penutur dan pendengarnya dalam sebuah wacana pembangunan pendidikan yang dituturkan di parlemen. Meskipun disadari, tidak semua politisi di parlemen mempunyai kemampuan retorik yang baik, tetapi hal itu merupakan salah satu aspek penting dalam bertindak tutur di parlemen, meskipun latar belakang aspek sosial budaya pun mempengaruhi gaya berkomunikasi tersebut [14, 15]. Tindak tutur yang santun dari seorang tokoh politik dapat mengondusifkan situasi politik tentang isu-isu pembangunan pendidikan yang tak jarang membuat resah masyarakat.

Namun tak dapat dihindari, ada beberapa konteks dalam wacana pembangunan pendidikan yang tidak sejalan antara parlementer dan pemerintah. Ketidaksetujuan tokoh politik di Komisi X DPR-RI dapat disampaikan secara santun dengan menggunakan strategi kesantunan Brown dan Levinson [3, 34]. Strategi kesantunan Brown dan Levinson tersebut mencakupi kesantunan berkisar nosi muka, yaitu muka positif dan muka negatif. Muka positif adalah muka yang mengacu pada citra diri orang yang berkeinginan agar apa yang dilakukannya, apa yang dimilikinya, atau apa yang merupakan nilai-nilai yang diyakininya diakui orang sebagai suatu hal yang merupakan nilai-nilai yang diyakininya diakui orang sebagai suatu hal yang baik, menyenangkan, patut

dihargai, dan seterusnya. Sebuah tindak tutur dapat mengancam muka mitra tuturnya. Oleh karena itu, untuk mengurangi ancaman terhadap muka mitra tutur itu di dalam berkomunikasi tidak selalu harus mematuhi prinsip kerja sama Grice, dan justru penutur hendaknya menggunakan prinsip kesantunan yang berkenaan dengan strategi-strategi kesantunan dalam Brown dan Levinson.

Salah satu contoh, saat Mendikbud Ristek Nadiem Makarim berbicara di forum *Transforming Education Summit* di PBB, New York, Amerika Serikat, pada Sabtu, 17 September 2022 tentang adanya *'shadow organization'* sebanyak 400 orang yang membantu Kemendikbud Ristek menciptakan berbagai aplikasi untuk pendidikan. Hal itu memunculkan isu hangat di masyarakat, publik menyoroti, hingga di rapat bersama Komisi X DPR-RI. Para anggota Komisi X memberi tanggapannya dan memperdebatkan *'shadow organization'* yang belum pernah didiskusikan kepada mereka.

Salah satu anggota Komisi X DPR-RI menanggapi keras tentang *'shadow organization'* tersebut. Secara pragmatis tuturan tokoh politik itu berintonasi tinggi dan keras yang merupakan implikatur terhadap prinsip kesantunan, meskipun efektif secara prinsip kooperatif. Tuturan dalam wacana politik seperti itu merupakan sumber daya komunikatif yang memungkinkan seorang politisi sebagai penutur untuk mengekspresikan sikapnya, sebagai tugas retorik-argumentatif [26]. Bahasa yang digunakan para politisi dapat mempengaruhi cara orang menilai, memutuskan atau bertindak [20, 27]. Paradigma tersebut melekat, karena kesantunan merupakan aturan sosial [38]. Bagi orang awam, kesantunan adalah sebuah konsep yang menunjuk perilaku sosial yang 'tepat' untuk bersikap dan bertutur yang umumnya berasal dari status sosial yang tinggi dari individu maupun kelompok. Konsep ini berlaku pula pada politisi yang bertugas di Komisi X DPR-RI. Sikap dan tuturan mereka menyebar luas di masyarakat, melalui wacana pemberitaan di televisi maupun media sosial, yang akan mempengaruhi tindak tutur masyarakat.

Masyarakat yang kurang paham dan berpotensi irasional sangat terdampak secara negatif dari ujaran-ujaran kebencian yang diunggah dalam konten media sosial para politisi [39]. Sangat penting menghindari ujaran kebencian atau penggunaan bahasa yang berpotensi memicu kebencian dalam sebuah pernyataan politik, hal ini juga merupakan pembelajaran berbahasa bagi masyarakat [40]. Menurut Leech [35], penggunaan kesantunan yang tidak tulus sebagai pengganti sikap tidak santun merupakan sikap yang ironis, dan dengan perilaku ini kita bertujuan merugikan dan menyudutkan orang lain. Seorang tokoh politik tidak direkomendasikan untuk bersikap seperti itu. Pragmatik interpersonal mencakupi keseluruhan prinsip percakapan yang harus dipatuhi, bukan salah satu saja. Sebagai tokoh politik, rambu-rambu prinsip percakapan harus dipatuhi. Secara ideologis, seorang tokoh politik memang membawa pesan politik dari partainya sebagai oposisi dan menyampaikan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Substansi tercapai, tetapi ada pelanggaran etika komunikasi yang dilakukan. Lazimnya, seorang tokoh politik mampu menjaga kecerdasan emosinya, meskipun dalam keadaan 'marah' atau 'kecewa'. Sebagaimana definisi seorang tokoh politik adalah figur panutan yang memiliki pribadi unggul dan mempunyai kecerdasan, serta kedewasaan yang dapat membimbing warga negaranya menjadi lebih maju dan mandiri [11, 32].

Perhatikan contoh kutipan tuturan Ketua Komisi X DPR-RI, Syaiful Huda, yang meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menarik sementara Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dan II dari peredaran karena dinilai memuat banyak kejanggalan.

- (1) "Kami meminta Kemendikbud untuk menarik sementara Kamus Sejarah Indonesia baik Jilid I dan Jilid II dari peredaran. Kami berharap ada perbaikan konten atau revisi sebelum kembali diterbitkan dan digunakan sebagai salah satu bahan ajar mata pelajaran sejarah. Di masing-masing jilid ada beberapa kejanggalan kesejarahan yang jika dibiarkan akan berbahaya bagi pembentukan karakter peserta didik karena adanya disinformasi."
(Berita Kompas TV, 20 April 2021)

Dalam penggalan wacana (1) tuturan Syaiful Huda meminta secara imposif kepada pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menarik sementara peredaran Kamus Sejarah. Tuturan ini disampaikan secara kooperatif karena pada konteks dan situasi yang tepat, yakni saat terjadi gejolak negatif atas penerbitan kamus tersebut karena menghilangkan sejumlah nama tokoh pejuang kemerdekaan dan tokoh pembangunan Indonesia. Meski tuturan itu bersifat imposif,

kekooperatifan tuturan Syaiful Huda tidak melanggar prinsip kesantunan berbahasa karena dituturkan dengan santun dan juga menggunakan strategi kesantunan berbahasa. Pada tuturan “Kami meminta Kemendikbud untuk menarik sementara Kamus Sejarah Indonesia baik Jilid I dan Jilid II dari peredaran.” akan menjadi kurang santun ketika Syaiful Huda mengujarkan “Saya memerintahkan Kemendikbud untuk segera menarik peredaran...” dan pada tuturan “Kami berharap ada perbaikan konten atau revisi sebelum kembali diterbitkan dan digunakan sebagai salah satu bahan ajar mata pelajaran sejarah” akan kurang santun ketika “Kami berharap...” dituturkan “Saya menginginkan...”. Selanjutnya pada tuturan “... ada beberapa kejanggalan dalam kamus sejarah tersebut dan dapat berbahaya bagi pembentukan karakter peserta didik karena adanya disinformasi” pun mematuhi prinsip kerja sama dan prinsip kesantunan. Ada kaidah dan strategi percakapan yang telah dipatuhi. Oleh karena itu, sebagai seorang tokoh politik yang membindangi masalah pendidikan di parlemen, para anggota dewan perwakilan rakyat ini dapat menggunakan kaidah dan strategi bahasa yang kooperatif dan santun sebagaimana yang direkomendasikan dari teori pragmatik interpersonal guna menyelamatkan citra dirinya dan mengondusifkan situasi yang kurang baik yang sedang terjadi di masyarakat.

Berikut dapat diperhatikan lagi petikan contoh tuturan-tuturan dalam penggalan wacana pada isu “Shadow Organization Kemendikbud”.

- (2) Bram: “... baik, ini kemudian sebelum kita membahasnya soal desakan kepada BPK untuk melakukan audit begitu Pak Dede. Apakah kemudian DPR kemarin juga mencari lebih dalam, mencari tahu lebih dalam begitu bagaimana kemudian disebutkan ini posisinya sejajar paling tidak dengan Dirjen begitu ini kan posisi yang cukup tinggi begitu untuk Kementerian?”
Dede Yusuf: “Kita mencoba berhusnudzon ya. Kita mencoba untuk berprasangka baik bahwa itu adalah kesalahan kalimat yang muncul dari Menteri bahwa sebetulnya bukan shadow tapi mirroring ya. Lalu kemudian sejajar ya, sebetulnya tidak sejajar tapi vendor. Tetapi kan tentu akhirnya menjadi pertanyaan publik ketika orang mempertanyakan lalu gunanya Dirjen, direktur, dan lain-lain itu apa? Agar kalau misalnya lebih banyak mempercayakannya kepada konsultan yang ada di luar, nah kami pada prinsipnya sudah menanyakan itu...”
 (“News Case” 27 September 2022)

Petikan tuturan di atas merupakan wawancara yang dilakukan Bram Herlambang dari CNN Indonesia pada acara “News Case” 27 September 2022, kepada Bapak Dede Yusuf (DY), Wakil Ketua Komisi X DPR RI, tentang “Gaduh Tim Bayangan Menteri Nadiem”. Selanjutnya, dapat diperhatikan petikan contoh tuturan berikut ini.

- (3) Aiman: “... Pak Syaiful, ada komentar tentang ini?”

Syaiful Huda: “Pertama kita kecewa memang, sejak dari awal kita kaget, Mas Nadiem menyampaikan terkait dengan keberadaan 400 Tim sebagai shadow organization di publik internasional. Saya kira ke depan, Mas Nadiem harus lebih hati-hati menyangkut berbagai informasi yang sifatnya semestinya itu tidak untuk konsumsi publik internasional....”
(Kompas TV “Sapa Indonesia Malam” 29 September 2022)

Tuturan dalam penggalan wacana (3) merupakan petikan wawancara Aiman Wicaksono dari Kompas TV pada acara “Sapa Indonesia Malam” 29 September 2022, kepada Syaiful Huda (SH), Ketua Komisi X DPR RI, tentang latar belakang terbentuknya “Tim Bayangan Kemendikbud Ristek”.

Tuturan-tuturan SH dan DY dalam penggalan wacana (2) dan (3) merupakan tuturan kooperatif yang mematuhi prinsip kerja sama pada bidal kuantitas karena memberikan kontribusi yang tepat pada setiap tahapan komunikasinya. Tuturan SH dan DY itu pun memenuhi bidal kemurahhatian pada prinsip kesantunan berbahasa. Hal itu demikian karena tuturan SH disampaikan secara ekspresif-evaluatif dengan memaksimalkan keuntungan pada pihak lain, dalam hal ini Mendikbud Ristek. Pada tuturan (3) SH tidak menggunakan kata-kata ‘marah’ tetapi hanya menggunakan kata-kata ‘kecewa’ dan ‘kaget’. Selanjutnya tuturan DY pada penggalan wacana (2) merupakan pematuhan terhadap prinsip kesantunan bidal keperkenanan dan kemurahhatian. Meskipun jika berkenaan dengan fungsi dan tugas DPR-RI salah satunya adalah melakukan pengawasan kepada pemerintah sebagai representasi suara rakyat sebagaimana ketentuan

perundang-undangan (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2019), para politisi anggota Komisi X di DPR RI berhak ‘marah’ karena tidak adanya pemberitahuan tentang keberadaan 400 tim sebagai ‘*Syadow Organization*’ di Kemendikbud Ristek. Secara evaluatif-imposif, tuturan SH pada penggalan wacana (3) juga memenuhi bidal kesantunan berbahasa, yakni bidal keperkenanan. Namun, pada konteks ini, SH dan DY lebih banyak menggunakan strategi kesantunan Brown and Levinson [3] dibandingkan kaidah kesantunan dalam prinsip kesantunan Leech [1]. Hal tersebut wajar, untuk menyelamatkan citra dirinya sebagai tokoh politik.

Dengan demikian, strategi tindak tutur tokoh politik berbeda dengan komunikasi politik yang hanya berisi pesan politik dalam konteks persaingan politik untuk memengaruhi, memperoleh, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan pada saat kampanye. Strategi tindak tutur merupakan kemampuan bertutur yang mematuhi prinsip percakapan dalam kegiatan komunikasi saat menjabat sebagai politisi di legislatif untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Tuturan tersebut merupakan ungkapan sikap personal seorang politisi dan memiliki pengaruh terhadap sikap dan perilaku pendengarnya, terutama para masyarakat yang diwakilinya di parlemen. Tokoh politik atau politisi secara definitif adalah figur yang menjadi panutan, mewakili aspirasi masyarakat yang mendelegasikannya. Konsep sebagai panutan tentunya dalam makna positif, memiliki karakter yang baik, salah satunya sikap berbahasa yang santun. Harus mampu mengendalikan kecerdasan berbahasa dan kecerdasan emosinya, kapan dan di manapun ia bertugas sebagai politisi yang mewakili rakyat.

4 Simpulan

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk menemukan model strategi tindak tutur tokoh politik dalam wacana pembangunan pendidikan dalam kerangka pragmatik interpersonal. Hasil penelitian menemukan 66 data tuturan tokoh politik di Komisi X DPR-RI dalam wacana pembangunan pendidikan yang dianalisis secara pragmatik interpersonal untuk selanjutnya dikembangkan sebagai model strategi tindak tutur tokoh politik dalam wacana pembangunan pendidikan. Model strategi tindak tutur tersebut mencakupi penggunaan prinsip kerja sama berbahasa, prinsip kesantunan berbahasa, strategi kesantunan berbahasa, dan strategi retorik interpersonal. Strategi tindak tutur merupakan kemampuan bertutur yang mematuhi prinsip percakapan dalam kegiatan komunikasi sebagai seorang tokoh politik di parlemen untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Tokoh politik sebagai figur yang menjadi panutan, mewakili aspirasi masyarakat yang mendelegasikannya tentunya harus memiliki karakter yang baik, salah satunya sikap berbahasa yang santun. Oleh karena itu, seorang tokoh politik harus mampu mengendalikan kecerdasan berbahasa dan kecerdasan emosinya, kapan dan di manapun ia bertugas sebagai tokoh politik yang mewakili rakyat.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DRTP Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud Ristek RI) atas dukungannya kepada tim peneliti melalui pendanaan hibah penelitian dasar disertasi (PDD) tahun 2024 dengan Surat Keputusan Nomor: 0667/E5/AL.04/2024 dan Nomor Kontrak Penelitian: 107.12.6/UN37/PPK.10/2024.

Referensi

- [1] G. . Leech, *Principles of Pragmatics*. London: Longman, 1983.
- [2] G. Leech, “Politeness: is there an East-West divide?,” 2007, doi: 10.1515/PR.2007.009.
- [3] P. Brown and S. C. Levinson, “Universals in language usage: Politeness phenomena,” in *Questions and*

- politeness: Strategies in social interaction*, Cambridge University Press, 1978, pp. 56–311.
- [4] M. Haugh, D. Z. Kádár, and S. Mills, “Interpersonal pragmatics: Issues and debates,” *J. Pragmat.*, vol. 58, no. 1, pp. 1–11, 2013, doi: 10.1016/j.pragma.2013.09.009.
- [5] D. Mardiana, “Teori Pragmatik dan Prinsip Kesantunan Geoffrey Neil Leech” dalam Rokhman, F, dkk,” in *Dialektika Filsafat Bahasa: Dari Strukturalisme ke Pascastrukturalisme*. Semarang: LPPM Universitas Negeri Semarang, Fathur Rokhman, Ed., Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Negeri Semarang, 2021, pp. 47–75. Accessed: Oct. 04, 2024. [Online]. Available: <https://www.scribd.com/document/498684312/Book-Chapter-Dialektika-Filsafat-Bahasa-Teori-Pragmatik-dan-Prinsip-Kesantunan-Geoffrey-Neil-Leech>
- [6] M. A. Locher and S. L. Graham, *Interpersonal pragmatics*, vol. 6. Walter de Gruyter, 2010. doi: <https://doi.org/10.1515/9783110214338>.
- [7] J. M. H. Fritz, “Contributions of Gerald M. Phillips to Interpersonal Communication Studies,” *Gerald M. Phillips*, p. 27, Accessed: Oct. 01, 2024. [Online]. Available: <https://pcasite.org/wp-content/uploads/2023/08/PSS-GMP-2005.pdf#page=31>
- [8] G. Antos, E. Ventola, and T. Weber, “Introduction: Interpersonal Communication: linguistic points of view,” in *Handbook of interpersonal communication*, De Gruyter Mouton, 2008, pp. 1–11. doi: <https://doi.org/10.1515/9783110211399.0.1>.
- [9] H. H. Mayuuf, “Rhetorical Pragmatics. Journal of Advanced Social Research,” *J. Adv. Soc. Res.*, vol. 5, no. 1, pp. 19–38, 2015.
- [10] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,” 2022. Accessed: Sep. 17, 2024. [Online]. Available: https://kbbi.web.id/politikus#google_vignette
- [11] M. Shahreza, “Sistem Politik Dan Proses Komunikasi Politik,” pp. 1–34, 2018, doi: 10.31227/osf.io/d9rk4.
- [12] D. Mardiana, F. Rokhman, and R. Rustono, “Interpersonal Pragmatics and Critical Linguistics: A Critical Pragmatic Analysis,” in *International Conference on Science, Education, and Technology*, Semarang, 2021, pp. 736–742. Accessed: Oct. 04, 2024. [Online]. Available: <https://proceeding.unnes.ac.id/ISET/article/view/2038>
- [13] I. Izhar, F. Rokhman, Rustono, and R. Pristiwati, “Linguistic Etiquette of Serving Food in Local Wisdom of Indonesia’s Manjau Maju Lampung Tribe Society,” *Cogent Arts Humanit.*, vol. 10, no. 1, 2023, doi: 10.1080/23311983.2023.2183610.
- [14] F. Rokhman, *Linguistik Disruptif: Pendekatan Kekinian Memahami Perkembangan Bahasa*. Bumi Aksara, 2020.
- [15] J. M. Amakali, “Persuasive speech acts in the Namibian National Assembly,” 2016, doi: 1205–1217. <https://doi.org/10.24297/jal.v7i2.5156>.
- [16] M. Taufiq and F. Rokhman, “Scientific communication skills profile of prospective science teachers based on sociocultural aspects,” *J. Pendidik. IPA Indones.*, vol. 9, no. 2, pp. 187–193, 2020, doi: 10.15294/jpii.v9i2.24366.
- [17] C. Ilie, “Parliamentary discourse,” *Int. Encycl. Lang. Soc. Interact.*, pp. 1–15, 2015, doi: <https://doi.org/10.1002/9781118611463.wbielsi201>.
- [18] N. Fairclough, *Critical discourse analysis: The critical study of language*, 1st ed. Routledge, 2013. Accessed: Oct. 01, 2024. [Online]. Available: <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203809068-3/critical-discourse-analysis-norman-fairclough>
- [19] N. Rashidi and M. Souzandehfar, “A critical discourse analysis of the debates between republicans and democrats over the continuation of war in Iraq,” *J. Linguist. Intercult. Educ.*, vol. 3, p. 55, 2010.
- [20] S. Hansson, “Calculated overcommunication: Strategic uses of prolixity, irrelevance, and repetition in administrative language,” *J. Pragmat.*, vol. 84, pp. 172–188, 2015, doi: <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2015.05.014>.
- [21] M. KhosraviNik and J. W. Unger, “Critical discourse studies and social media: Power, resistance and critique in changing media ecologies,” *Methods Crit. Discourse Stud.*, vol. 3, pp. 205–233, 2016, Accessed: Oct. 01, 2024. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/283213787_KhosraviNik_M_Unger_J_Critical_Discourse_Studies_and_Social_Media_power_resistance_and_critique_in_changing_media_ecologies_In_Ruth_Wodak_and_Michael_Meyer_ed_Methods_of_Critical_Disocourse_Studies_3rd
- [22] S. S. M. Hashim and S. Safwat, “Speech acts in political speeches,” *J. Mod. Educ. Rev.*, vol. 5, no. 7, pp. 699–706, 2015, doi: 10.15341/jmer(2155-7993)/07.05.2015/008.
- [23] N. Flores-Ferrán, “I’m very Good at and maybe that’s Why I’m Center Stage...”: Pronominal Deixis and Trump,” *English Linguist. Res.*, vol. 6, no. 1, p. 74, 2017, doi: DOI:<https://doi.org/10.5430/elr.v6n1p74>.
- [24] K. D. S. Maskuri, S. Tarjana, D. Djatmika, and D. Purnanto, “Politeness strategies in directive speech acts in local Indonesian parliament assembly proceedings,” *Int. J. English Linguist.*, vol. 9, no. 3, p. 85, 2019, doi: doi:10.5539/ijel.v9n3p85.

- [25] J. D. Salayo, "Women's right, a call for life: A critical discourse analysis of pres. Donald Trump's speech for the 2020 march for life," *JEELS (Journal English Educ. Linguist. Stud.*, vol. 7, no. 1, pp. 115–135, 2020, doi: 10.30762/jeels.v7i1.1906.
- [26] A. Haselow, "Expressing stance in spoken political discourse—The function of parenthetical inserts," *Lang. Sci.*, vol. 82, p. 101334, 2020, doi: <https://doi.org/10.1016/j.langsci.2020.101334>.
- [27] C. How, "A Critical Discourse Study on Meghan and Harry's CBS Primetime Interview.," *GEMA Online J. Lang. Stud.*, vol. 22, no. 2, 2022, doi: <http://dx.doi.org/10.17576/gema-2022-2202-12>.
- [28] D. Kartika, R. K. Rahardi, M. Aziz, and W. Rahmat, "Depicting reflections of power on illocutionary acts of Japanese Prime Minister Shinzō Abe's speeches on Covid-19," *Indones. J. Appl. Linguist.*, vol. 13, no. 2, pp. 284–293, 2023, doi: <https://doi.org/10.17509/ijal.v13i2.63078>.
- [29] H. J. Prayitno *et al.*, "The politeness comments on the Indonesian President Jokowi Instagram official account viewed from politico pragmatics and the character education orientation in the disruption era," *Indones. J. Learn. Adv. Educ.*, vol. 1, no. 2, pp. 52–71, 2019.
- [30] F. Nursyamsi, A. Purnama, and H. Hartono, "Interpersonal meaning in Jokowi's speech a case study at summit apec," *TheGIST*, vol. 1, no. 1, 2019.
- [31] N. Majid, "Strategi Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum Di Era Digital," *PERSEPTIF J. Ilmu Sos. Dan Hum.*, vol. 1, no. 2, pp. 53–61, 2023.
- [32] M. Fakhruroji, "Pola komunikasi dan model kepemimpinan Islam," 2019, *Mimbar Pustaka*.
- [33] Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan (Research and Development/R&D)*, 5th ed. Bandung: Alfabeta, 2021. Accessed: Nov. 14, 2024. [Online]. Available: <https://cvalfabeta.com/product/metode-penelitian-dan-pengembangan-research-and-development/>
- [34] P. Brown and S. C. Levinson, *Politeness: Some universals in language usage*, no. 4. Cambridge university press, 1987. doi: 10.1016/B978-0-08-097086-8.53072-4.
- [35] G. Leech, *Principles of Pragmatics*. Routledge, 2016. doi: 10.4324/9781315835976.
- [36] H. Rustono, "Pokok-pokok pragmatik," 1999, *Semarang: CV IKIP Semarang Press*.
- [37] A. Arifin, *Komunikasi politik: filsafat, paradigma, teori, tujuan, strategi, dan komunikasi politik Indonesia*, 2nd ed., vol. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011. Accessed: Oct. 01, 2024. [Online]. Available: <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=15578>
- [38] P. Brown, "Politeness and language," in *The International Encyclopedia of the Social and Behavioural Sciences (IESBS)*, (2nd ed.), Elsevier, 2015, pp. 326–330. doi: 10.1016/B978-0-08-097086-8.53072-4.
- [39] M. Saragih and A. Arika, "Critical Discourse Analysis on the Politicians' Social Media Posts," *English Teach. Linguist. J.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–4, 2020, doi: <http://dx.doi.org/10.30596%2Fetlj.v1i1.4120>.
- [40] C. F. Ononye and N. J. Nwachukwu, "Metalinguistic evaluators and pragmatic strategies in selected hate-inducing speeches in Nigeria," *Indones. J. Appl. Linguist.*, vol. 9, no. 1, pp. 48–57, 2019, doi: <https://doi.org/10.17509/ijal.v9i1.13602>.